

**BUPATI MINAHASA SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**



**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN 2015**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

Menimbang: a. bahwa kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayakatan. Oleh karena itu perlu didukung dengan dana untuk kelancaran kegiatan dimaksud;

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Kelurahan, tidak diatur secara jelas pembagian dana bagi Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Bantuan Operasional Kelurahan Kelurahan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 Nomor 10 Seri A);

## MINAHASA SELATAN TAHUN 2015

Menetapkan : **BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN DI KABUPATEN MEMUTUSKAN :**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai erangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan
6. Bantuan Operasional Kelurahan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan.

## **BAB II**

### **SUMBER-SUMBER KEUANGAN KELURAHAN**

#### Pasal 2

Keuangan Kelurahan bersumber dari :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
- (2) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Bantuan Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak ketiga.
- (3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB III**

### **PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN**

#### Pasal 3

Penggunaan Bantuan Operasional Kelurahan diatur sebagai berikut :

- a. 70 % ...



- a. 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk pelayanan publik, antara lain
  1. pembangunan/pembuatan jalan lingkungan;
  2. penimbunan jalan lingkungan;
  3. pemasangan gorong-gorong;
  4. pembangunan talud jalan lingkungan;
  5. pembangunan jalan setapak;
  6. pembangunan drainase jalan lingkungan;
  7. pembangunan saluran irigasi/selokan
  8. Pembangunan rabat beton
  9. Bantuan Sosial Kemasyarakatan
  10. Bantuan Organisasi Kepemudaan
  11. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- b. 30 % (tiga puluh perseratus), dipergunakan untuk belanja operasional pemerintah kelurahan, yaitu :
  - a. belanja barang dan yaitu biaya barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka operasionalisasi Pemerintahan Desa yang bersifat rutin seperti ATK, peralatan kantor, biaya jasa pihak ketiga, biaya foto copy, biaya cetak dan pengadaan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya sewa, biaya makan dan minum rapat serta BBM.
  - b. belanja pemeliharaan yang meliputi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, kendaraan dinas dan gedung kantor.
  - c. biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 4

Besarnya Bantuan Operasional Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Minahasa Selatan ini.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN**

#### **Pasal 5**

Mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Kelurahan:

- (1) Bantuan Operasional Kelurahan dari Pemerintah Daerah disalurkan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kelurahan.
- (2) Penggunaan Bantuan Operasional Kelurahan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBUKUAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Guna kepentingan pengawasan, bendahara dalam melaksanakan pengelolaan BOK harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. buku kas umum
  - b. buku pajak
  - c. buku bank

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 7**

Lurah menyampaikan laporan<sup>36</sup> realisasi pelaksanaan BOK kepada Bupati berupa:

- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.

**BAB VI ...**

**BAB VII**

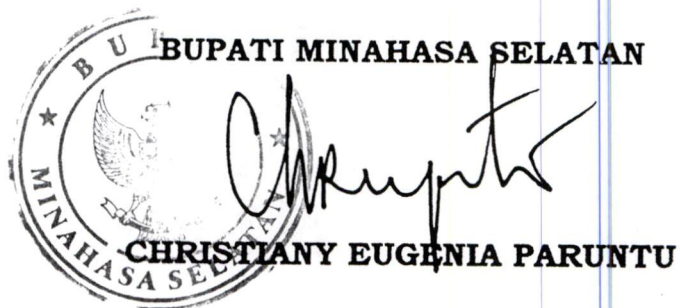
**PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 19 JANUARI 2015



Diundangkan di Amurang  
Pada tanggal 19 JANUARI 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Regional Secretary, is written over the text of the official title.

**Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19581023 198103 1 012**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR... 09



**BAB VII**

**PENUTUP**

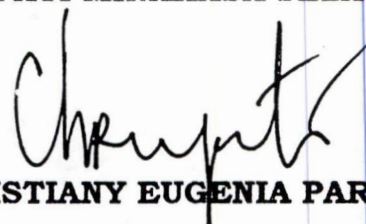
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 19 JANUARI 2015

**BUPATI MINAHASA SELATAN**












**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Amurang  
Pada tanggal 19 JANUARI 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



**Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19581023 198103 1 012**

NO	PENGELOLAH	PARAF	KET.
1.	KASUBID		
2.	KABID KETAHANAN MASYARAKAT		
3.	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
4.	KABAG HUKUM & HAM		
5.	KEPALA BADAN PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
6.	KEPALA DPKPAD		
7.	ASISTEN BIDANG ADMINISTASI UMUM		
8.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN & KESRA		
9.	SEKRETARIS DAERAH		
10.	BUPATI	Mohon untuk di Tanda Tangan	

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR.....

**BAB VII**

**PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 19 Januari 2015

**BUPATI MINAHASA SELATAN**

**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

NO	PENGLOLAH	PARAF	KET.
1.	KASUBID		
2.	KABID KETAHANAN MASYARAKAT		
3.	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
4.	KABAG HUKUM & HAM		
5.	KEPALA BADAN PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
6.	KEPALA DPKPAD		
7.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM		
8.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN & KESRA		
9.	SEKRETARIS DAERAH		
10	BUPATI		Monon untuk di Tanda Tangan

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR.....

Diundangkan di Amurang  
Pada tanggal 19 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**

**Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 19581023 198103 1 012



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Selatan

Nomor : 9 Tahun 2015

Tanggal : 19 JANUARY 2015

Tentang : Bantuan Operasional Kelurahan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah BOK	Keterangan
1	Amurang Barat	1 Rumoong Bawah	30,000,000	
		2 Kawangkoan Bawah	30,000,000	
2	Amurang	1 Buyungon	30,000,000	
		2 Lewet	30,000,000	
		3 Uwuran I	30,000,000	
		4 Uwurang II	30,000,000	
		5 Bitung	30,000,000	
		6 Ranoyapo	30,000,000	
	Amurang Timur	1 Pondang	30,000,000	
		2 Ranomea	30,000,000	

**BUPATI MINAHASA SELATAN**



**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Selatan

Nomor : Tahun 2015

Tanggal :










Tentang : Bantuan Operasional Kelurahan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah BOK	Keterangan
1	Amurang Barat	1 Rumoong Bawah	30,000,000	
		2 Kawangkoan Bawah	30,000,000	
2	Amurang	1 Buyungon	30,000,000	
		2 Lewet	30,000,000	
		3 Uwuran I	30,000,000	
		4 Uwurang II	30,000,000	
		5 Bitung	30,000,000	
		6 Ranoyapo	30,000,000	
	Amurang Timur	1 Pondang	30,000,000	
		2 Ranomea	30,000,000	

**BUPATI MINAHASA SELATAN**



**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

NO	PENGELOLAH	PARAF	KET.
1.	KASUBID		
2.	KABID KETAHANAN MASYARAKAT		
3.	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
4.	KABAG HUKUM & HAM		
5.	KEPALA BADAN PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
6.	KEPALA DPKPAD		
7.	ASISTEN BIDANG ADMINISTASI UMUM		
8.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN & KESRA		
9.	SEKRETARIS DAERAH		
10	BUPATI	Mohon untuk di Tanda Tangan	

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Selatan

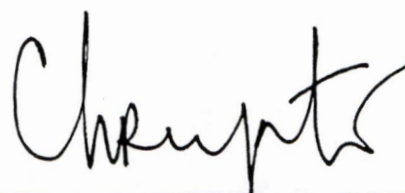
Nomor : Tahun 2015

Tanggal :










Tentang : Bantuan Operasional Kelurahan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah BOK	Keterangan
1	Amurang Barat	1 Rumoong Bawah	30,000,000	
		2 Kawangkoan Bawah	30,000,000	
2	Amurang	1 Buyungon	30,000,000	
		2 Lewet	30,000,000	
		3 Uwuran I	30,000,000	
		4 Uwurang II	30,000,000	
		5 Bitung	30,000,000	
		6 Ranoyapo	30,000,000	
Amurang Timur	Amurang Timur	1 Pondang	30,000,000	
		2 Ranomea	30,000,000	

**BUPATI MINAHASA SELATAN**



**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

NO	PENGELOLAH	PARAF	KET.
1.	KASUBID		
2.	KABID KETAHANAN MASYARAKAT		
3.	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
4.	KABAG HUKUM & HAM		
5.	KEPALA BADAN PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
6.	KEPALA DPKPAD		
7.	ASISTEN BIDANG ADMINISTASI UMUM		
8.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN & KESRA		
9.	SEKRETARIS DAERAH		
10	BUPATI	Mohon untuk di Tanda Tangan	